

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Orientasi politik telah menjadi isu menarik untuk selalu dibahas. Orientasi politik pada perempuan dibedakan menjadi dua aspek, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit berupa aktif dalam politik praktis dan aktif dalam segala kegiatannya, sedangkan dalam arti luas berupa keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan yang mempunyai dampak kepada masyarakat luas, mempunyai kemampuan, kesempatan dan kekuasaan, dalam pengambilan keputusan yang mendasar pada sesuatu yang menyangkut kehidupan orang banyak (Mery G.Tan 1992:1).^a

Pasal 5 Ayat (1) UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, yang berisi “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. Tidak tampak berbeda dengan Pemilu 2014 tetap mendasarkan pada prinsip proporsional atau perwakilan berimbang. Artinya, suatu daerah pemilihan diwakili sejumlah wakil yang didapat dari perolehan suara partai-partai politik peserta pemilu. Diadakannya pemilu secara langsung ini para pemilih pada pemilu legislatif dapat mengetahui dengan pasti siapa-siapa saja calon legislatif yang terdaftar dan yang akan mereka pilih.

Menurut Niemi Weisberg Niemi dan Weisberg (1876), bahwa Pemilu tidak hanya sekedar memberikan hak warga negara untuk memilih pemerintahan, tetapi juga berfungsi untuk membatasi para pimpinan politik agar berperilaku sebaik mungkin supaya dapat dipilih kembali dalam Pemilu berikutnya.¹ Oleh karena itu, Pemilu merupakan sarana penghubung antara kepentingan masyarakat dan kebijakan umum. Pemilu juga

¹ Josef Kristiadi. Pemilu dan Perilaku Memilih. Disertasi FIS UGM. Yogyakarta. 1993. Hal. 25

merupakan instrumen politik agar konflik, distribusi, dan pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara tertib dan damai..

Orientasi individu terhadap objek politik dapat dipandang dari tiga hal, yaitu orientasi kognitif berupa pengetahuan dan keyakinan, orientasi afektif yang merupakan perasaan terkait dan keterlibatan atau sejenisnya, dan orientasi evaluatif mengenai penilaian dan opini tentang objek politik. Oleh karena itu seorang individu mungkin memiliki tingkat akurasi tinggi terhadap cara kerja sistem politik, siapa pemimpinnya dan masalah-masalah dari kebijakannya. Inilah yang disebut dimensi kognitif. Namun ia mungkin memiliki perasaan alienasi atau penolakan terhadap sistem. Mungkin keluarga atau sahabatnya sudah punya sikap seperti itu. Mungkin ia tak merespon tuntutan terhadapnya oleh sistem, itulah yang disebut dimensi afektif. Akhirnya seseorang mungkin memiliki penilaian moral terhadap sistem. Barangkali norma-norma demokrasinya mendorong dia menilai sistem sebagai tidak cukup responsif terhadap tuntutan politik atas norma-norma etikanya mendorong dia mengecam tingkat korupsi dan nepotisme. Dimensi-dimensi ini saling berkaitan dan mungkin memiliki kombinasi dalam berbagai cara. Objek politik yang dimaksud disini adalah anggota legislatif dan sistemnya adalah Pemilu.

Menurut Ranney (dalam Ryass, 2000 : 64), terdapat dua komponen utama dari budaya politik, yaitu orientasi kognitif dan orientasi afektif Sementara itu, Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga komponen objek politik sebagai berikut: (1). Orientasi kognitif : yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya, (2). Orientasi afektif : yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya, dan (3).

Orientasi evaluatif : yaitu keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Salah satu orientasi politik yang menarik untuk diteliti adalah orientasi politik perempuan anggota legislatif Kota Padang. Perempuan di lembaga legislatif tidak hanya penting dari aspek perimbangan antara laki-laki dan perempuan. Namun lebih dari itu, kehadiran Anggota Parlemen Perempuan diharapkan bisa menjamin kepentingan kaum perempuan menjadi salah satu prioritas kebijakan, diantaranya terkait dengan isu pemberantas kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan layanan kesehatan. Adapun yang dialami DPRD Kota Padang sekarang ini adalah meningkatnya Anggota DPRD perempuan periode 2019-2024. Dikarenakan perempuan anggota legislatif tersebut memiliki orientasi politik dan memiliki visi dan misi. Salah satu contoh kasus yang terjadi saat pemilu legislatif 2019-2024 di Kota Padang perempuan lebih unggul dari pada Kota dan Kabupaten lainnya yaitu anggota DPRD Kota Padang berjumlah 6 orang. Penelitian ini akan meneliti tentang orientasi politik yang dimiliki oleh anggota legislatif perempuan periode 2019-2024 Kota Padang. Dalam kasus ini peneliti akan menggali lebih dalam tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan orientasi politik anggota legislatif perempuan Kota Padang periode 2019-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Orientasi politik membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang mempengaruhi perilaku politik yang dilakukan seseorang, sedangkan perilaku berupa kegiatan keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi perilaku politik seseorang yang akan berdampak kepada pilihan pemilih perempuan dalam memilih, tentu saja pada dasarnya pilihan itu dipengaruhi oleh orientasinya termasuk kaum perempuan. Orientasi politik masih dalam tataran pemikiran individu yang bersifat abstrak, namun setelah itu akan terbentuk sebuah

partisipasi politik dan individu akan berperilaku politik yaitu dalam hal memilih pada pemilu yang juga disebut sebagai partisipasi politik. Orientasi politik ini juga merupakan keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi perilaku politik seseorang yang akan berdampak kepada pilihan pemilih perempuan dalam memilih. Tentu saja pada dasarnya pilihan itu dipengaruhi oleh orientasinya termasuk kaum perempuan.

Orientasi seseorang bisa saja berubah sesuai dengan pengetahuan yang didapatnya dan nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai-nilai itulah yang akan mempengaruhi, dan dapat “membentuk”, keseluruhan “sikap” masyarakat terhadap suatu orientasi, itulah yang muncul atau terpolakan ke atas permukaan sebagai orientasi politik masyarakat. Nilai-nilai itu dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu, yang dapat berupa informasi, pengetahuan, lingkungan, teman sepermainan, dan sebagainya. Sedangkan faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, berupa pendidikan, keluarga dan sebagainya.²

Orientasi individu terhadap objek politik dapat dipandang dari tiga hal yaitu orientasi kognitif berupa pengetahuan dan keyakinan, orientasi afektif yang merupakan perasaan terkait dan keterlibatan atau sejenisnya, dan orientasi evaluatif mengenai penilaian dan opini tentang objek politik. Oleh karena itu seorang individu memiliki tingkat akurasi tinggi terhadap cara kerja sistem politik, siapa pemimpinnya dan masalah-masalah dari kebijakannya. Inilah yang disebut dimensi kognitif. Namun ia memiliki perasaan alienasi atau penolakan terhadap sistem. Keluarga atau sahabatnya sudah punya sikap seperti itu. Ia tak merespon tuntutan terhadapnya oleh sistem, Itulah yang disebut dimensi afektif. Akhirnya seseorang memiliki penilaian moral terhadap sistem.

Dimensi-dimensi ini saling berkaitan dan memiliki kombinasi dalam berbagai cara. Orientasi politik pada perempuan dibedakan menjadi dua aspek yaitu orientasi politik

² *Jurnal Politik Profetik* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013

perempuan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti luas merupakan keikutsertaan dalam politik praktis dan aktif dalam segala kegiatannya, sedangkan dalam arti luas merupakan keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan yang mempunyai dampak kepada masyarakat luas, mempunyai kemampuan, kesempatan dan kekuasaan, dalam pengambilan keputusan yang mendasar pada sesuatu yang menyangkut kehidupan orang banyak.

Tabel 1.1
Jumlah Anggota DPRD Kota Padang Hasil Pemilu 2014 dan 2019

Jenis Kelamin	2014	2019
Laki-laki	40 orang	39 orang
Perempuan	5 orang	6 orang

Sumber: diolah oleh peneliti

Tabel di atas menunjukkan bahwa anggota DPRD Kota Padang hanya ada 6 orang perempuan yang menjadi anggota DPRD Kota Padang yaitu, Nila kartika, Salisma, Elly Thrisyanti, Dewi Susant, Irawati Meuraksa, dan Yuhilda Darwis. Hal ini menarik untuk diteliti karena enam anggota perempuan yang menduduki kursi sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Padang memiliki latar belakang yang berbeda- beda sebelum terpilih sebagai anggota legislatif Kota Padang dan memberi dampak positif bagi kebangkitan kaum perempuan dalam politik lokal Kota Padang. Salah satu anggota perempuan DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti yang telah dua kali terpilih sebagai anggota legislatif Kota Padang dari Partai Gerindra. Elly Thrisyanti membuktikan bahwa dia bisa bersaing dan bertahan dari seleksi pemilihan anggota legislatif dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk kembali menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Elly Thrisyanti salah satu perempuan yang duduk di kursi DPRD Kota Padang untuk 2 (dua) periode, ini membuktikan bahwa pengalaman sebagai anggota legislatif sebelumnya telah menjadikannya terpilih kembali sebagai anggota DPRD, terlihat bahwa para pemilih percaya bahwa dia berhasil membuktikan keterwakilannya pada periode sebelumnya hingga terpilih kembali. Ini

membuktikan bahwa pengalaman politik seseorang bisa menentukan keberhasilan pada pemilihan berikutnya.

Begitu juga dengan Yuhilda Darwis yang juga mampu membuktikan keberhasilannya sebagai anggota DPRD, sebagaimana pada periode sebelumnya Yuhilda Darwis menjabat sebagai anggota legislatif Kota Lampung. Sama halnya dengan Elly Thrisyanti pengalaman politik yang dimiliki seseorang selama ini yang membuat seseorang terpilih sebagai anggota legislatif.

Berbeda dengan Dewi Susanti yang terpilih sebagai anggota legislatif Kota Padang. Dimana Dewi Susanti bukan orang yang berkecimpung di dunia politik seperti rekannya Elly dan Yuhilda dimana mereka telah aktif di politik tetapi Dewi Susanti bisa duduk dan terpilih sebagai anggota legislatif Kota Padang, yang lebih menakjubkan Dewi Susanti memperoleh suara terbanyak dari partai yang mengusungnya, bahkan mengalahkan suara laki-laki yang satu partai dengan Dewi Susanti.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan di latar belakang, maka penelitian ini fokus kepada persoalan orientasi politik perempuan dengan beberapa alasan; pertama, karena penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang menjelaskan tentang bagaimana orientasi politik perempuan anggota legislatif di Kota Padang pada Pemilu 2019. Kedua, karena penelitian-penelitian sebelumnya belum ada menjelaskan tentang orientasi politik perempuan yang terpilih. Ketiga, Proses orientasi politik yang dilakukan oleh perempuan anggota legislatif Kota Padang ini tidak hanya sebuah ritual politik menjelang pemilu legislatif dilaksanakan. Orientasi politik merupakan keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi perilaku politik seseorang yang akan berdampak kepada calon legislatif, sedangkan pada dasarnya pilihan itu dipengaruhi oleh orientasinya untuk menjadi anggota legislatif. Jumlah anggota legislatif perempuan Kota Padang periode 2019-2024 adalah 6 orang.

Dari fenomena-fenomena yang penulis temui terkait dengan Orientasi Politik Perempuan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana orientasi politik perempuan calon anggota legislatif terpilih pada pemilu 2019 di Kota Padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan di dalam latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

Menjelaskan dan menganalisis orientasi politik perempuan calon anggota legislatif terpilih pada pemilu 2019 di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kontribusi dalam penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain dalam memahami penggunaan teori orientasi politik dan juga dapat memberikan kontribusi untuk menjelaskan terkait dengan keterpilihan anggota legislatif.
2. Dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambah pustaka di bidang ilmu politik, menambah dan memperluas pengetahuan serta khasanah karya-karya ilmiah, serta menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang relevan.

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk para perempuan calon legislatif yang akan mengikuti pemilu.